

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kas adalah salah satu komponen dari aktiva yang sangat vital bagi kelangsungan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun perusahaan swasta (Rahmadi Murwanto *et al*, 2006 : 1). Kas merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional perusahaan. Tanpa adanya Manajemen Kas yang baik, suatu organisasi mungkin dapat kehilangan reputasinya dan sulit untuk bertransaksi dengan pihak lain. Oleh karena itu Manajemen Kas merupakan suatu keharusan bagi seluruh organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta.

Organisasi yang dapat memperbaiki metode dalam menerima dan mengeluarkan kas akan lebih sukses. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kekurangan uang dalam organisasi dapat menimbulkan biaya yang seharusnya dapat dihindari manakala dapat terdapat Manajemen Kas yang baik. Kekurangan kas akan menyebabkan suatu organisasi harus mencari pinjaman dana dalam rangka menutupi kekurangan kas untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dengan adanya Manajemen Kas yang baik suatu organisasi dapat menyediakan berbagai sumber daya lainnya tepat pada waktunya ketika dibutuhkan.

Manajemen Kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Manajemen Kas memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya likuid yang dimilikinya

dengan cara yang tepat (Rahmadi Murwanto *et al*, 2006 : 5). Namun pada kenyataannya Manajemen Kas pemerintah sering kali kurang diperhatikan. Praktik Manajemen Kas yang buruk tidak saja menimbulkan pemborosan, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan dapat mengurangi efektivitas dari kebijakan-kebijakan moneter yang dilaksanakan.

Adapun kendala yang dihadapi selama ini dalam Manajemen Kas adalah tersebarnya tempat penyimpanan uang negara sehingga mengakibatkan uang negara yang telah terkumpul menjadi uang yang menganggur (*Idle Cash*) dan terdapat pengendapan uang yang nilainya relatif cukup besar pada bank operasional. Padahal uang tersebut dapat digunakan untuk kegiatan investasi yang mendatangkan pendapatan bagi pemerintah. Kendala lain yang juga dihadapi adalah selang waktu penerimaan kas negara sampai ke rekening negara yang kurang efektif. Hal tersebut merupakan bukti bahwa sistem pengelolaan kas yang selama ini berlaku telah menimbulkan *Oppurtunity loss* bagi pemerintah.

Selain itu *Idle Cash* secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan pinjaman pemerintah. Hal tersebut menjadikan pengelolaan kas pemerintah menjadi kurang efektif dan efisien. Dengan adanya permasalahan *Idle Cash*, telah menimbulkan permasalahan lain yang merupakan implikasi yang selama ini berjalan yaitu adanya ribuan rekening bank dengan saldo yang tidak berbunga.

Dalam Manajemen Kas negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki rekening pada bank-bank umum untuk menampung penerimaan maupun pengeluaran negara. Penerimaan maupun pengeluaran tersebut ditampung pada bank-bank yang

ditunjuk pemerintah selaku Bank Operasional atau Bank Persepsi. Pengeluaran ditampung pada Bank Operasional, sedangkan penerimaan ditampung di Bank Persepsi. Namun permasalahan justru ada pada Bank Operasional Karena pengendapan uang yang nilainya relatif cukup besar dengan jumlah rekening yang cukup banyak atau berpuluh-puluh sehingga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah untuk melakukan pemantauan.

Tuntutan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah dan pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah secara efisien, mendorong pemerintah menerapkan sistem yang baik dalam Manajemen Kas negara yang berbasis terhadap nilai waktu uang (*time value of money*). Negara selama ini melupakan bahwa uang mempunyai nilai terkait dengan waktu, secara normal makin lama uang disimpan maka akan terdepresiasi atau mengalami penurunan daya beli. Selain itu banyaknya rekening yang ada menyebabkan Manajemen Kas belum optimal. Dengan demikian pengelolaan uang membutuhkan perencanaan yang matang bahkan dibutuhkan manajemen tersendiri. Oleh karena itu, sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki Manajemen Kas negara dengan menerapkan *Treasury Single Account* (Rekening Tunggal Pemerintah) yang merupakan salah satu contoh praktik terbaik Internasional dalam pengelolaan kas.

Treasury Single Account adalah sebuah rekening yang berada di bank sentral yang digunakan untuk menampung semua penerimaan negara dan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara (Andie Megantara *et al*, 2006 : 39). Pada setiap akhir harinya saldo rekening pemerintah di luar *Treasury Single Account* akan dilimpahkan ke rekening *Treasury Single Account*. Konsolidasi

penerimaan pemerintah ke dalam satu rekening memungkinkan pemerintah yang terdapat pada rekening-rekening di luar *Treasury Single Account*. Dalam pelaksanaan *Treasury Single Account* diperlukan perubahan mekanisme pengelolaan penerimaan negara melalui bank persepsi yang ada saat ini. Hal ini dilakukan untuk mencapai penerimaan negara yang diterima pada hari yang sama, pengeluaran negara dilakukan secara tepat waktu, adanya transparansi berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kas yang baik.

Treasury Single Account yang diterapkan yaitu dengan mekanisme rekening saldo nihil sehingga saldo lebih dulu selalu ditransfer ke rekening BUN atau Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Konsolidasi pada rekening BUN atau RKUN di Bank Indonesia mengakibatkan saldo pada bank operasional atau bank persepsi selalu nihil dan tidak ada lagi pengendapan saldo kas yang tidak terpakai. Penerapan *Treasury Single Account* di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang Menjelaskan mengenai perlakuan terhadap penerimaan dan pengeluaran negara yang dilakukan melalui RKUN. Saldo Rekening Penerimaan setiap harinya wajib disetorkan seluruhnya ke RKUN pada bank sentral. Rekening Pengeluaran yang ada pada bank umum diisi dengan dana bersumber dari RKUN pada bank sentral yang jumlahnya disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tanggal 1 September 2006 *Treasury Single Account* Rekening Pengeluaran mulai dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.06/2006 tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo

Nihil pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam rangka Penerapan *Treasury Single Account*. Pada tanggal 1 Oktober 2007 berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam rangka Penerapan *Treasury Single Account* dengan dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.06/2006.

Tanggal 3 November 2008 Rekening Penerimaan mulai diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pelimpahan Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi pada hari kerja berikutnya. *Treasury Single Account* Rekening Penerimaan mulai dilaksanakan Pada tanggal 1 Juli 2009 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2009 tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam rangka Penerapan *Treasury Single Account* dengan dicabutnya Peraturan Menteri keuangan Nomor 161/PMK.05/2008. Pada tanggal 1 Januari 2010 berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam rangka penerapan *Treasury Single Account* dengan dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2009.

Penerapan *Treasury Single Account* diharapkan mampu mengendalikan saldo dan aliran kas pada pengelolaan keuangan negara. Dengan pengelolaan kas yang baik diharapkan mampu meminimalisir *Idle Cash* dengan cara pemanfaatan semaksimal mungkin untuk mendukung keperluan alokasi dana dan investasi

melalui perencanaan yang baik. Dengan dana yang masuk setiap harinya, pemerintah dapat mengelola dana secara produktif dan dapat mengurangi dana pinjaman yang timbul sebelum *Treasury Single Account* diterapkan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Manajemen Kas negara telah mengarah pada sistem yang telah menjadi praktik terbaik Internasional.

Berdasarkan latar belakang yang berkaitan dengan penerapan sistem Manajemen Kas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul “**Implementasi *Treasury Single Account* Terhadap Manajemen Kas Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi *Treasury Single Account* pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta?
2. Bagaimana Implementasi *Treasury Single Account* terhadap Manajemen Kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta?

C. Tujuan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam pembuatan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi *Treasury Single Account* dan Manajemen Kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.
2. Mengevaluasi implementasi *Treasury Single Account* terhadap Manajemen Kas pada Kantor Perbendaharaan Negara Yogyakarta.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang akan diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti tentang implementasi *Treasury Single Account* terhadap manajemen kas yang digunakan pada Perbendaharaan Negara Indonesia sehingga peneliti dapat mengetahui pengelolaan kas negara yang baik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi instansi dalam pengelolaan manajemen kas.

E. Batasan Masalah

Dalam Penelitian Tugas akhir nantinya untuk lebih spesifik penulis membatasi penelitian pada implementasi *Treasury Single Account* Rekening Penerimaan terhadap Manajemen Kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kusumanegara nomor 11 Yogyakarta.

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2009:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan menurut Kriyantono (2010:41) data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari KPPN Yogyakarta. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penelitian.

Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Data yang berkaitan dengan Manajemen Kas
 - a) Laporan Konsolidasi Saldo Kas bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016
 - b) Laporan Pagu dan Realisasi belanja Per Bagian Anggaran periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016
 - 2) Data yang berkaitan dengan *Treasury Single Account*
 - a) Laporan Keuangan Pemerintah pusat tahun 2007
 - b) Laporan Konsolidasi Saldo Kas bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016
- b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2005:129), data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen-dokumen yang ada. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa data sekunder adalah data tambahan yang didapatkan untuk membantu penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi, penulis dapat menyimpulkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung.

b. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jadi, penulis dapat menyimpulkan observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati dan meneliti pelaksanaan *Treasury Single Account* pada KPPN Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Jadi, penulis dapat menyimpulkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca,

mengamati dokumen atau catatan yang sudah ada, serta mengadopsi materi yang berasal dari *website* sesuai dengan topik yang dibutuhkan.

d. Studi Kepustakaan

Menurut M. Nazir (2005:111) studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Jadi, Penulis dapat menyimpulkan studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa beberapa referensi buku yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkup penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Sujoko Efferin *et al* (dalam Setianingtias, 2008 : 41) pendekatan deskriptif yaitu metode yang menginvestigasi secara intensif sesuatu atau beberapa situasi yang sama dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu pendekatan pemecahan masalah dengan berdasarkan perhitungan angka mengevaluasi pelaksanaan *Treasury Single Account* pada KPPN Yogyakarta yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan.

Analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya penerimaan, pengeluaran dan saldo kas terjadi setiap bulannya untuk mendapatkan besarnya *Idle Cash* yang terjadi perencanaan kas untuk pengeluaran dan remunerasi.

Lebih jelasnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh jumlah *Idle Cash*

Idle Cash adalah uang yang mengendap atau menganggur pada bank yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran atau penerimaan.

Rumus untuk Mengetahui Jumlah *Idle Cash*:

$$IC = Posisi - SKM$$

Keterangan :

IC = *Idle Cash*

Posisi= Saldo Kas Akhir

SKM = Saldo Kas Minimal

Rumus ini didapatkan dari Mamduh Hanafi (2004)

- b. Mengetahui ketepatan dalam Perencanaan Kas (*ForeCasting*)

Rumus untuk mengetahui ketepatan dalam Perencanaan Kas adalah:

$$\frac{\text{Realisasi penarikan dana untuk pengeluaran}}{\text{Rencana penarikan dana untuk pengeluaran}} \times 100\%$$

Sedangkan rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyediaan dana pada rekening kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi penarikan untuk pengeluaran}}{\text{Jumlah dana yang disediakan untuk pengeluaran}} \times 100\%$$

Rumus ini didapatkan dari tata cara permintaan kebutuhan dana pada KPPN oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) tahun 2009.

- c. Menghitung penerimaan negara atas Remunerasi penempatan dana pada Bank Indonesia

Rumus yang digunakan untuk menghitung Remunerasi penempatan dana pada Bank Indonesia adalah:

$$65\% \times BI \text{ Rate } \times \text{Saldo Kas}$$

Rumus ini didapatkan dari kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dengan Gubernur BI tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara Nomor : 17/KMK.05/2009 dan Nomor : 113/KEP.GBI/2009 tanggal 31 Januari 2009.